



PENGARUH KEBIJAKAN TARIF TRUMP TERHADAP TRANSISI ENERGI INDONESIA

Anugrah Juwita Sari* & Anih Sri Suryani**

Abstrak

Kebijakan Tarif Trump 2025 menambah tekanan terhadap upaya transisi energi Indonesia, khususnya melalui kenaikan harga dan gangguan rantai pasok teknologi energi bersih. Tulisan ini mengkaji pengaruh kebijakan tarif Trump terhadap transisi energi di Indonesia serta peluang dan strategi dalam menghadapi kebijakan tarif tersebut. Ketergantungan Indonesia pada impor panel surya dan komponen energi dari China membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global. Namun, situasi ini juga membuka peluang untuk memperkuat industri dalam negeri melalui hilirisasi sumber daya strategis seperti nikel, produksi panel surya lokal, serta diversifikasi sumber impor dari negara-negara yang tidak terlibat konflik tarif. Selain itu, kerja sama regional seperti ASEAN Power Grid dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada negara besar. Komisi XII DPR RI perlu mendorong kebijakan pro-hilirisasi industri energi terbarukan serta aktif memantau implementasi program transisi energi agar tepat sasaran, sehingga mampu untuk tidak bergantung pada impor, serta mampu memanfaatkan potensi sumber daya nasional secara optimal.

Pendahuluan

Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Brasil pada November 2024, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya terhadap transisi energi (Mustika, 2025). Transisi energi ini mencakup upaya peningkatan penggunaan biodiesel dan peralihan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menuju energi baru terbarukan (EBT) (Mustika, 2025). Pemerintah juga berencana untuk mengembangkan kapasitas EBT melebihi 75 gigawatt (GW) dalam 15 tahun mendatang (Mustika, 2025). Namun, upaya transisi energi ini menghadapi tantangan signifikan sebab Indonesia bergantung pada impor teknologi energi bersih dari China, seperti panel surya (Riyandanu, 2025). Sementara itu, China sedang mengalami ketegangan perdagangan akibat kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Pada awal April 2025, Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif baru, yakni tarif universal sebesar 10% diberlakukan untuk semua impor dan tarif resiprokal tambahan dikenakan pada negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, termasuk China dan Indonesia (Sidik & Intan, 2025). China dikenakan tarif tambahan 125%, sedangkan Indonesia dikenakan tarif tambahan sebesar 32% (Sidik & Intan, 2025). Tarif baru ini

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: anugrah.sari@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: anih.suryani@dpr.go.id

berlaku untuk produk impor berupa elektronik, garmen, tekstil, komponen teknologi, mineral, minyak kelapa sawit, kendaraan, dan lain-lain (Sidik & Intan, 2025). Untuk itu, tulisan ini mengkaji pengaruh kebijakan tarif Trump terhadap transisi energi di Indonesia serta peluang dan strategi dalam menghadapi kebijakan tarif tersebut.

Pengaruh Tarif Trump terhadap Transisi Energi Indonesia

Kebijakan Tarif Trump merujuk pada langkah terbaru Presiden AS dalam menaikkan bea masuk terhadap berbagai produk impor. Kebijakan ini mencakup tarif dasar sebesar 10% serta tarif tambahan (tarif resiprokal) yang lebih tinggi untuk negara-negara dengan surplus perdagangan terhadap AS (Sidik & Intan, 2025). Negara-negara yang terdampak antara lain China, Vietnam, Indonesia, India, Korea Selatan, dan sejumlah negara lainnya. Kebijakan tarif ini bertujuan mengatur impor dengan tarif timbal balik guna memperbaiki praktik perdagangan yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan AS yang berlangsung secara terus-menerus (Sidik & Intan, 2025).

Dalam rantai pasok global teknologi energi, posisi Indonesia saat ini masih didominasi sebagai negara pengimpor, bukan produsen utama. Sebagian besar komponen penting dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia seperti panel surya didatangkan dari China (Riyandanu, 2025). Meskipun kemudian Presiden AS memberikan penangguhan selama 90 hari untuk penerapan tarif resiprokal terhadap mitra dagang dan mengecualikan beberapa produk asal China, AS tetap memberlakukan tarif resiprokal terhadap produk-produk teknologi hijau, termasuk modul surya dan kendaraan listrik (Timorria, 2025). Ketergantungan ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global, terutama pada produk yang masuk dalam daftar tarif tinggi oleh AS. Meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam perang dagang antara AS dan negara-negara seperti China, tetap dapat terkena dampaknya. Peningkatan tarif impor oleh AS terhadap produk energi China dapat mendorong naiknya harga global panel surya, yang akhirnya turut membebani biaya transisi energi di Indonesia. Bahkan tanpa kebijakan proteksionis AS, BloombergNEF mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, negara-negara G20 telah memberlakukan 16 tarif impor baru terhadap teknologi bersih (Timorria, 2025). Sejumlah negara maju seperti AS, Kanada, dan Uni Eropa menjadikan kendaraan listrik buatan China sebagai sasaran dari kebijakan tarif tersebut (Timorria, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada di luar pusat konflik, Indonesia terpengaruh oleh dinamika geopolitik dalam rantai pasok energi global.

Kebijakan tarif Trump dapat mempercepat peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan karena dampaknya terhadap harga global (Mustika, 2025). Dengan adanya tarif tinggi pada produk energi dari China, seperti panel surya, harga energi terbarukan bisa menjadi lebih mahal di pasar global, termasuk di Indonesia. Namun, energi

terbarukan, yang tidak diperdagangkan, tidak terpengaruh oleh volatilitas harga bahan bakar fosil. Seiring dengan tekanan perdagangan global yang mengarah pada ketidakstabilan harga bahan bakar fosil, seperti yang terjadi pada pasokan gas dari Rusia, kebijakan tarif ini mendorong negara-negara untuk beralih ke sumber energi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yakni energi terbarukan.

Selain itu, negara-negara yang memiliki pendanaan, seperti negara Timur Tengah dan China, perlu menginvestasikan uangnya ke pengembangan energi terbarukan (Mustika, 2025). Berdasarkan data IEA (International Energy Agency) pada 2024 Timur Tengah telah melakukan investasi sebesar US\$175 miliar di sektor energi, 15% di antaranya adalah investasi pada fasilitas energi terbarukan (Issetiabudi, 2025). Investasi ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia pada fasilitas energi terbarukan misalnya untuk mengembangkan infrastruktur, mendapatkan transfer teknologi, memperkuat industri lokal, mendanai proyek energi terbarukan besar, serta memperkuat kerjasama internasional dalam transisi energi.

Peluang dan Strategi Adaptasi Indonesia

Situasi global imbas kebijakan tarif Trump ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera mengembangkan energi terbarukan. Berdasarkan siaran pers Kementerian ESDM tahun 2023 Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 3.686 GW yang berasal dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan juga laut (Kementerian ESDM, 2023). Dengan potensi yang besar ini, Indonesia telah memiliki modal yang kuat untuk menciptakan kemandirian energi.

Selain itu, di tengah tekanan global akibat kebijakan tarif proteksionis seperti yang diberlakukan oleh AS, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kemandirian energi melalui strategi adaptasi yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mendorong hilirisasi industri energi terbarukan, termasuk memproduksi panel surya dan baterai berbasis nikel secara lokal. Indonesia melalui PLN Indonesia Power (PLN IP) dan perusahaan patungan anak usahanya telah meluncurkan pabrik solar panel dengan kapasitas produksi sebesar 1 Gigawatt Peak (Hidayatullah, 2024). Meskipun demikian, diperlukan dukungan Pemerintah dalam memberikan proteksi yang mengarahkan para pelaku usaha untuk membeli komponen panel surya buatan dalam negeri (Riyandanu, 2023).

Di sisi lain, menurut catatan The USGS (United States Geological Survey) dan Badan Geologi Kementerian ESDM, Indonesia memiliki sumber daya nikel terbesar kedua di dunia (Kementerian ESDM, 2024). Data tahun 2023 menunjukkan bahwa sumber daya nikel Indonesia dalam bentuk bijih mencapai 18,55 miliar ton dengan cadangan sebesar

5,33 miliar ton bijih (Kementerian ESDM, 2024). Dengan jumlah sumber daya dan cadangan nikel sebesar ini, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengembangkan industri baterai secara mandiri.

Diversifikasi sumber impor komponen energi dari negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik tarif juga dapat menjadi langkah strategis jangka pendek untuk menjaga stabilitas pasokan teknologi energi terbarukan di Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga dapat memperkuat kerja sama regional melalui inisiatif seperti ASEAN Power Grid (APG), yang bertujuan membangun sistem jaringan listrik terintegrasi antarnegara ASEAN. APG dirancang untuk mendorong integrasi dan saling berbagi sumber energi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar seperti AS dan China. Dalam rencana jangka panjangnya, APG mencakup 18 potensi interkoneksi lintas batas dengan kapasitas gabungan diperkirakan mencapai 33 GW pada tahun 2040, termasuk interkoneksi listrik antara Indonesia dan Malaysia, yang mencakup pembangunan jalur transmisi bertegangan 275 kilovolt dari Sarawak di Malaysia ke Kalimantan Barat di Indonesia (Yusgiantoro & Swastika, 2023).

Penutup

Kebijakan Tarif Trump memberikan tekanan tidak langsung terhadap upaya transisi energi Indonesia, terutama melalui lonjakan harga dan ketidakpastian dalam rantai pasok global. Ketergantungan terhadap komponen impor dan dinamika geopolitik menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan teknologi energinya. Namun, situasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi melalui pengembangan industri panel surya lokal, hilirisasi sumber daya alam strategis seperti nikel, serta perluasan kerja sama regional. Dengan strategi adaptif yang tepat dan dukungan kebijakan yang kuat, Indonesia tidak hanya dapat meredam dampak kebijakan proteksionis global, tetapi juga mempercepat langkah menuju sistem energi bersih dan berkelanjutan. Untuk itu, Komisi XII DPR RI perlu mendorong kebijakan pro-hilirisasi industri energi terbarukan serta aktif memantau implementasi program transisi energi agar tepat sasaran, sehingga mampu untuk tidak bergantung pada impor, serta mampu memanfaatkan potensi sumber daya nasional secara optimal.

Referensi

- Hidayatullah, M. R. (2024, Oktober 31). PLN IP luncurkan pabrik solar panel terintegrasi di Kendal, kapasitas 1 GWp. *Ekonomi Hijau*. <https://hijau.bisnis.com/read/20241031/652/1812354/pln-ip-luncurkan-pabrik-solar-panel-terintegrasi-di-kendal-kapasitas-1-gwp>
- Issetiabudi, D. E. (2025, Februari 26). Pemerintah Berpeluang Dorong Pendanaan Proyek EBT dari Timur Tengah. *Ekonomi Hijau*. <https://hijau.bisnis.com/read/20250226/652/1842890/pemerintah-berpeluang-dorong-pendanaan-proyek-ebt-dari-timur-tengah>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024, November 3). *Pemilik cadangan nikel dan bauksit terbesar di dunia, ini yang dilakukan Indonesia* [Siaran Pers]. <https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024, Februari 4). *Miliki potensi EBT 3.686 GW, Sekjen Rida: Modal utama jalankan transisi energi Indonesia* [Siaran Pers]. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/miliki-potensi-ebt-3686-gw-sekjen-rida-modal-utama-jalankan-transisi-energi-indonesia>
- Mustika, P. P. (2025, April 15). Masa depan kedaulatan dan transisi energi Indonesia imbas tarif Trump. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/masa-depan-kedaulatan-dan-transisi-energi-indonesia-imbasp-tarif-trump>
- Riyandanu, M. F. (2023, Februari 23). Tekan impor dari Cina, RI akan bangun pabrik panel surya Rp 4 triliun. *katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/63f7559b752b3/tekan-impor-dari-cina-ri-akan-bangun-pabrik-panel-surya-rp-4-triliun>
- Timorria, I. F. (2025, April 14). Perdagangan teknologi energi bersih dalam pusaran perang tarif. *Ekonomi Hijau*. <https://hijau.bisnis.com/read/20250414/652/1868966/perdagangan-teknologi-energi-bersih-dalam-pusaran-perang-tarif>
- Sidik, B., & Intan, N. (2025, April 14). Tarif Trump, kebijakan kontradiktif dari semangat "make America great again". *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/tarif-trump-kebijakan-kontradiktif-dari-semangat-make-america-great-again>
- Yusgiantoro, F. C., & Swastika, M. B. (2023, Oktober 6). ASEAN power grid dalam era energi terbarukan. *katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/indepth/opini/651f70337ce72/asean-power-grid-dalam-era-energi-terbarukan>

